



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Faktor Penyebab Perbedaan Perilaku India terhadap
Pakistan dalam Sengketa Kashmir di Era Vajpayee dan
Modi**

Skripsi

Oleh

I Gusti Putu Ayu Raina Clarissa

2014330190

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Faktor Penyebab Perbedaan Perilaku India terhadap
Pakistan dalam Sengketa Kashmir di Era Vajpayee dan
Modi**

Skripsi

Oleh

I Gusti Putu Ayu Raina Clarissa

2014330190

Pembimbing

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda pengesahan skripsi

Nama : I Gusti Putu Ayu Raina Clarissa
Nomor Pokok : 2014330190
Judul : Faktor Penyebab Perbedaan Perilaku India terhadap
Pakistan dalam Sengketa Kashmir di Era Vajpayee dan
Modi

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
pada Rabu, 22 Mei 2019
dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si. : _____

Sekretaris

Idil Syawfi, S.IP., M.Si. : _____

Anggota

Adrianus Harsawaskita S.IP., M.A. : _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I Gusti Putu Ayu Raina C.
NPM : 2014330190
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Faktor Penyebab Perbedaan Perilaku India
terhadap Pakistan dalam Sengketa Kashmir di Era
Vajpayee dan Modi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 4 April 2019

Meterai 6000

I Gusti Putu Ayu Raina C.

Abstrak

Nama : I Gusti Putu Ayu Raina C.
NPM : 2014330190
Judul : Faktor Penyebab Perbedaan Perilaku India terhadap Pakistan dalam Sengketa Kashmir di Era Vajpayee dan Modi

*Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya perbedaan sikap India terhadap Pakistan terkait sengketa Kashmir, serta hal yang menjadi faktor perbedaan perilaku tersebut. Pada dasarnya, walaupun negara dikuasai oleh pemimpin yang berbeda, kebijakan serta perilaku yang dimiliki negara tersebut seharusnya bersifat kontinuitas. Nyatanya, India memiliki pendekatan yang berbeda, sehingga penulis sampai kepada sebuah pertanyaan penelitian, yakni “Bagaimana komparasi perilaku India dalam menghadapi sengketa Kashmir dengan Pakistan di rezim Atal Bihari Vajpayee dan Narendra Modi? Dan apa saja yang menjadi faktor munculnya perbedaan perilaku tersebut?”. Dalam menganalisis, akan digunakan konsep *Interests, Threat, Opportunity and Capability*, dengan metode kualitatif. Di pemerintahan Vajpayee, India sering menginisiasi dialog resolusi, serta mengunjungi Pakistan dengan tangan yang terbuka. Sebaliknya, pada masa Modi memerintah sebagai perdana menteri India yang baru, India kerap kali menolak dialog-dialog yang diusulkan oleh Pakistan, serta garis perbatasan kian lama kian menegang dan sering terjadi baku tembak. Perbedaan signifikan yang terlihat adalah sikap India yang cenderung lebih agresif di era Modi, dibandingkan dengan sikap pasif India di era Vajpayee.*

Keywords: India, Pakistan, Kashmir Dispute, LoC, Terrorism, India Foreign Policy, Atal Bihari Vajpayee, Narendra Modi.

Abstract

Nama : I Gusti Putu Ayu Raina C.
NPM : 2014330190
Judul : Faktor Penyebab Perbedaan Perilaku India terhadap Pakistan dalam Sengketa Kashmir di Era Vajpayee dan Modi

This research aims to explain the difference of India's behavior in addressing Pakistan in the Kashmir dispute, as well as analyzing the factors of the behavior change. Essentially, even though a state was ruled by different leaders, the state's policies and behavior should be continuity. In fact, India has a slightly different approach, so the author comes to a research question, "How is the comparison of India's behavior in addressing Pakistan regarding the Kashmir dispute in Atal Bihari Vajpayee and Narendra Modi's regime? And what are the factors of this behavior difference?". Concept of Interests, Threat, Opportunity, and Capability, will be used to analyze this qualitative method research. In the government of Vajpayee, India frequently initiated some resolution dialogues, as well as visiting Pakistan with open arms. On the contrary, in Modi's reign as the new prime minister of India, India often denied dialogues proposed by Pakistan, also the borderline became increasingly tense and frequent shootouts occurred. The significant behavior difference that can be seen is that India tends to be more aggressive during the Modi era compared to India's passive behavior in the era of Vajpayee.

Keywords: India, Pakistan, Kashmir Dispute, LoC, Terrorism, India Foreign Policy, Atal Bihari Vajpayee, Narendra Modi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatNya lah, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Faktor Penyebab Perbedaan Perilaku India terhadap Pakistan dalam Sengketa Kashmir di Era Vajpayee dan Modi.” Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar akademik Strata-1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, motivasi, serta saran dari berbagai pihak yang ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang teristimewa, kepada orang tua penulis yang terus mendoakan, dan mendukung penulis, serta memberikan motivasi terbesar selama penyusunan skripsi ini.
2. Kakak penulis, Vito, serta adik penulis, Juan yang tak jemu-jemu selalu menghibur di kala penulis lelah dalam proses pengerjaan skripsi.
3. Martha Florensia Alexander, S.E., yang selalu menjadi *reminder* serta memberikan motivasi, doa, dan dukungannya kepada penulis.
4. Mas Idil Syawfi, S.IP., M.Si., selaku pembimbing.
5. Mba Sylvia Yazzi, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

6. Mas Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si., serta Mas Adrianus Harsawaskita S.IP., M.A., selaku dosen penguji.
7. Serta teman-teman guru sekolah minggu Aruna 3, dan teman-teman seperjuangan yang terlalu banyak untuk disebutkan, yang mendukung penulis selama penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa pembuatan dan penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Demi penyempurnaan skripsi ini, penulis memohon kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, Agustus 2019

I Gusti Putu Ayu Raina Clarissa

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
Abstrak	i
Abstract	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR FIGUR	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
Gambar 1.1.1	2
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Perumusan Masalah	8
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.4.1. Tujuan Penelitian	8
1.4.2. Kegunaan Penelitian	9
1.5. Kajian Literatur	9
1.6. Kerangka Pemikiran	14
Gambar 1.6.1	14
1.7. Metodologi Penelitian	20
1.8. Sistematika Penulisan	22
BAB II DUA ERA INDIA DALAM MENGHADAPI PAKISTAN DAN KASHMIR DALAM SENGGKETA PEREBUTAN WILAYAH KASHMIR	24
2.1. Kebijakan India Terkait Kashmir pada Era Vajpayee (1998-2004)	24
2.1.1. Doktrin Vajpayee	25
2.1.2. Deklarasi Lahore	26
2.1.3. Kargil War	28
2.1.4. Agra Summit	30
2.1.5. Operation Sadbhavana	33
2.1.6. Proposal Perdamaian Baru	34
2.1.7. Pola Kebijakan di Era Vajpayee	35
2.2. Kebijakan India Terkait Kashmir pada Era Modi (2014-2017)	36
2.2.1. Doval Doctrine	36
2.2.2. Cold Start Doctrine	39
2.2.3. Uri Attack	40

2.2.4	Pelanggaran akan HAM.....	42
2.2.5	Pola Kebijakan di Era Modi	44
2.3.	Kekontrasan Kebijakan.....	45
BAB III ANALISIS KOMPARASI FAKTOR PERBEDAAN PERILAKU		
INDIA TERKAIT SENGKETA KASHMIR.....		47
3.1.	Kepentingan.....	47
3.1.1.	Kepentingan India di Masa Vajpayee	48
3.1.2.	Kepentingan India di Masa Modi.....	50
3.2.	Ancaman.....	54
3.2.1.	Insiden Teror di India.....	54
3.2.2.	Pakistan GDP and Military Expenditure.....	56
3.2.3.	Relasi Sio-Pak	59
3.2.4.	Kapabilitas Nuklir Pakistan.....	63
3.3.	Kesempatan.....	63
3.3.1.	Sanksi Nuklir Pakistan.....	64
3.3.2.	Teroris Insiden di Pakistan	69
3.4.	Kapabilitas	70
3.5.	Perbandingan India di 2 Era Pemerintahan.....	73
BAB IV KESIMPULAN		76
DAFTAR PUSTAKA		80

DAFTAR TABEL

Bab 3:

Tabel 3.3.1.1. Sanksi Nuklir yang Dijatuhkan Amerika Serikat Untuk India	65
Tabel 3.3.1.2. Sanksi Nuklir Pakistan yang Dibatalkan oleh Amerika Serikat ...	66
Tabel 3.3.1.3. Sanksi Nuklir yang Masih Berlaku bagi Pakistan	68
Tabel 3.5.1. Faktor Kepentingan Nasional	73

DAFTAR GRAFIK

Bab 3:

Grafik 3.2.1.1. Jumlah Insiden Terorisme yang Menimpa India	55
Grafik 3.2.2.1. GDP Pakistan	57
Grafik 3.2.2.2. Anggaran Militer Pakistan	58
Grafik 3.2.3.2. Aktivitas Ekspor Pakistan – China	61
Grafik 3.2.3.3. Aktivitas Impor Pakistan – China	62
Grafik 3.3.2.1. Jumlah Insiden Terorisme yang Menimpa Pakistan	70
Grafik 3.4.1. GDP India	71
Grafik 3.4.2. Anggaran Militer India	72

DAFTAR FIGUR

Bab 1:

Gambar 1.1.1. Peta Pembagian Wilayah Kashmir 2

Gambar 1.6.1. *Understanding State Behavior* 14

DAFTAR SINGKATAN

India Occupied Kashmir (IoK)

Pakistan Occupied Kashmir (PoK)

Sumber Daya Alam (SDA)

Line of Control (LoC)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

United Nations (UN)

United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP)

United Nations Commission for India and Pakistan (UNCIP)

Confidence-Building Measures (CBMs)

Hak Asasi Manusia (HAM)

Threat Perception Theory (TPT)

Gross Domestic Product (GDP)

United Nations General Assemble Meeting (UNGA)

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)

Prime Minister (PM)

Mikoyan-Gurevich (MiG)

Memorandum of Understanding (MoU)

South Asian Association Regional Cooperation (SAARC)

Paratrooper Special Force (Para SF)

Brazil, Russia, India, China, and South Africa (BRICS)

National Security Advisor (NSA)

United States Dollar (USD)

China Pakistan Economic Corridor (CPEC)

Joint Cooperation Committee (JCC)

Weapon Mass Destruction (WMD)

Indian Air Force (IAF)

All Parties Hurriyat Conference (APHC)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

India merupakan salah satu negara yang cukup banyak disorot oleh dunia internasional karena pertumbuhan ekonomi, keunggulan militernya, serta senjata nuklir yang dimilikinya. Sebagai sebuah negara, India pun tak lekang dari masalah-masalah yang perlu dihadapi, baik problema internal ataupun eksternal. Dengan Pakistan, India cukup memiliki masalah yang kelam dikarenakan oleh adanya unifikasi ras, kultur, dan budaya yang bukan mempererat tali persaudaraan, malah menimbulkan masalah. Bukan hanya bermasalah dengan kultur saja, tetapi sebagai negara tetangga, kedua negara ini memiliki sengketa wilayah yang mengakar secara historis. Perebutan teritori yang melibatkan wilayah Kashmir ini, bermula sejak kedua negara tersebut merdeka, yakni di tahun 1947.¹ Terbaginya Kashmir ke dalam 2 wilayah, yakni *India Occupied Kashmir* (IoK), *Pakistan Occupied Kashmir* (PoK). Serta ada pula sedikit keterlibatan China di dalamnya, dan menjadikan wilayah tersebut ujungnya terbagi menjadi 3 bagian.²

Kashmir, merupakan sebuah wilayah yang terletak di utara India, yang juga berbatasan dengan Pakistan dan China. Di tahun 2017, Kashmir memiliki populasi sebesar 14.12 juta jiwa. Di mana sekitar 96.4% dari total penduduk

¹ Sumantra Bose, *Kashmir: Roots of Conflict, Paths of Peace* (Massachusetts: Harvard University Press, 2003)

² Arjun Makhijani, "Short history of Kashmir Dispute," Institute for Energy and Environmental Research, diakses pada Aug. 21, 2017, <http://ieer.org/resource/south-asia/short-history-of-kashmir-dispute/>

Kashmir, merupakan penganut agama Islam, sedangkan sisanya merupakan umat Hindu, serta Sikh.³ Dengan begitu, Kashmir memiliki ikatan secara historis, emosional, dan kultural yang sangat erat dengan *the Islamic homeland*, yakni Pakistan. Secara geografis, Kashmir terbentang seluas 224,739 kilometer², dan terbagi ke tiga bagian, yakni Kashmir yang dikuasai China sebesar 37,555 kilometer², wilayah yang dikuasai Pakistan sebesar 85,846 kilometer², dan yang terbesar adalah yang dimiliki oleh India, yakni sebesar 101,338 kilometer².⁴ Berikut merupakan visualisasi peta wilayah terbaginya wilayah Kashmir. Lihat gambar 1.1.1.

Gambar 1.1.1.

Peta Pembagian Wilayah Kashmir



³ “Population of Jammu And Kashmir,” *India Population 2018*, diakses pada Mar. 11, 2019, <http://indiapopulation2018.in/population-of-jammu-and-kashmir-2018.html>

⁴ Amanda Briney, “Geography and History of Kashmir,” *ThoughtCo*, diakses pada Mar. 12, 2019, <https://www.thoughtco.com/geography-of-kashmir-1435549>

Tanah Kashmir merupakan tanah yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam ini yang dijadikan sebagai motor dari perekonomian daerah Kashmir sendiri. SDA tersebut meliputi mineral, minyak dan gas bumi, bauksit, serta gipsum⁵. Di bidang agrikulturnya, tanah Kashmir yang subur sebagian besar banyak ditanami beras, jagung, gandum, jelai, buah-buahan, dan sayuran. Produksi kayu, serta produksi ternak pun ikut menjadi motor penggerak perekonomian Kashmir.⁶ Secara topologi, daerah lembah Kashmir sangat ideal untuk dijadikan benteng pertahanan. Pasalnya, Kashmir dikelilingi oleh barisan pegunungan tinggi, termasuk gunung Himalaya. Selain itu, Pakistan cukup bergantung pada 3 sungai yang berhulu di Kashmr, yakni sungai Indus, Jhelem, dan Cemab yang mengairi sekitar 19 juta are tanah di Pakistan.

Banyaknya keunggulan SDA yang dimiliki Kashmir, menjadikan faktor terbesar bagi India dan Pakistan bersikeras untuk memperebutkan wilayah tersebut. Dengan masyarakat Kashmir yang bermayoritaskan penduduk muslim, Pakistan merasa bahwa dirinya memiliki persamaan identitas yang erat. Begitu pula dengan India, Kashmir adalah sumber pundi-pundi penghasil devisa negara. Dengan penduduk India yang jumlahnya miliaran, tentunya mereka membutuhkan sumber dana untuk ‘menghidupi’ rakyatnya, dan sumber dana ini dapat diperoleh oleh India melalui sumber daya yang dimiliki Kashmir.

Setahun setelah dimulainya sengketa ini, yakni di tahun 1949, India melihat adanya penyerangan yang dilancarkan Pakistan di sekitar *Line of Control*

⁵ Walter Lawrence, *The Valley of Kashmir* (London: Henry Frowde Oxford University Press Warehouse Amen Corner, E.C., 1895).

⁶ Amanda Briney, “Geography and History of Kashmir,”

(LoC). New Delhi tidak memberikan ultimatum dengan sembarangan, melainkan membawa kasus ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera ditangani. Walaupun semenjak tahun 1949, gencatan senjata telah dimonitori *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP),⁷ di tahun 1965, perang tetap terjadi. Tahun tersebut merupakan sebuah momen di mana India mengumumkan perang melawan Pakistan. Perang ini disebabkan oleh tuduhan India terhadap Pakistan yang melancarkan infiltrasi di IoK, dan memulai penyerangan di perbatasan LoC. Dalam perang ini India mencoba untuk menaklukkan kota terbesar kedua Pakistan, yakni Lahore.⁸ Masyarakat Kashmir pun menjadi terlibat dalam perseteruan India, dan Pakistan, dan sampai memunculkan anggota separatis yang didukung oleh Pakistan, dan memperkeruh kasus ini. Peperangan ini diakhiri oleh mediasi dari Britania Raya.

Karena pengawasan dari UNMOGIP dari UNCIP tidak cukup efektif untuk meningkatkan level gencatan senjata di wilayah perbatasan *de facto*, maka pada bulan Juli 1972, ketika India berada di bawah pemerintahan Indira Gandhi, New Delhi bersama dengan Pakistan menandatangani perjanjian Simla.⁹ Terdapat satu klausa dalam perjanjian Simla ini yang menyinggung masalah Kashmir yang akan diselesaikan secara bilateral oleh India dan Pakistan, dan bahwa kedua negara harus menghormati LoC, yaitu batas-batas wilayah kepemilikan Kashmir

⁷ Victoria Schofield, *Kashmir in Conflict: India, Pakistan, and the Unending War* (London: I.B. Tauris, 2000).

⁸ "A Chronology Of The Kashmir Dispute," *Sound Vision*, diakses pada Mar. 20, 2019, <https://www.soundvision.com/article/a-chronology-of-the-kashmir-dispute>

⁹ Ibid.

oleh India dan Pakistan secara *de facto*.¹⁰ Permasalahan ini dilanjutkan ke tahun 1988, yang merupakan tahun di mana kekerasan di Kashmir memuncak.¹¹ Angka militansi meroket diiringi dengan serangkaian tembakan dan pengeboman di wilayah tersebut, yang hal ini dikarenakan meroketnya juga angka pemberontakan yang terjadi di IoK, sekitar 100 demonstran menjadi korban tentara India di Jembatan Gawakadal.¹²

Tahun-tahun setelahnya pun merupakan tahun yang sulit, karena pemberontakan masih saja terjadi. Hal ini menggiring India untuk lebih waspada untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan wilayahnya. Pasalnya, para separatis ini kemudian terpecah menjadi salah satu kelompok teroris yang sampai saat ini dicukong oleh Pakistan, yakni Hizbul-Mujahideen. Dalam era pemberontakan ini, India melarang kunjungan resmi dari PBB.¹³ Kelanjutan dari pemberontakan ini diakhiri dengan perang yang lagi-lagi melibatkan India dan Pakistan, yakni *Kargil War*. Setelah itu, serangan demi serangan baik dari kubu India, maupun Pakistan, tak dapat dibendung lagi. Bukan hanya tentara Pakistan saja yang menjadi korban jiwa kekerasan dari pihak India tetapi juga banyak militan, demonstran, separatis, dan rakyat Kashmir lainnya, ikut menjadi korban. India cenderung untuk memilih *status quo*, dibandingkan untuk memaksakan

¹⁰ “Kashmir Affair-Historical Roots,” *Peace Kashmir*, diakses pada Aug. 22, 2017, <http://www.peacekashmir.org/kashmir-affairs/historical-roots.htm>

¹¹ “Kashmir – Chronology of Major Events,” *Peace Kashmir*, diakses pada Mar. 20, 2019, <http://www.peacekashmir.org/jammu-kashmir/jk-chronology-of-major-events.htm>

¹² “Kashmir Profile – Timeline,” *BBC News*, diakses pada Mar. 20, 2019, <https://www.bbc.com/news/world-south-asia-16069078>

¹³ “A Chronology Of The Kashmir Dispute,” <https://www.soundvision.com/article/a-chronology-of-the-kashmir-dispute>

wilayah Kashmir. Tetapi bagaimana pun juga, India tidak ingin terlihat lemah di mata lawannya.

1.2. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya, sebuah negara seharusnya memiliki kebijakan luar negeri, serta perilaku yang bersifat kontinuitas. Dengan adanya sifat kontinuitas, sebuah negara akan memiliki struktur yang lebih kuat, terutama jika telah diterapkan sejak dari dulu. Terlebih lagi, perbedaan cara pandang dari sebuah negara, dapat merusak tatanan kebijakan luar negeri yang sebelumnya telah direncanakan oleh pemerintah sebelumnya. Menurut Rosenau, “*Continuity and change are thus conceived to be opposite sides of the same coin*”.¹⁴ Hal ini berarti bahwa walaupun dengan aktor yang sama, perubahan ataupun kontinuitas seperti 2 sisi koin yang berbeda, yang memiliki visi maupun cara pandang yang berbeda. Mengenai perubahan dan stabilitas negara ini juga diperkuat oleh kritik Leon Hurwitz yang menyatakan bahwa stabilitas dapat tercapai selama elemen-elemen yang menyokongnya tidak berubah. *The absence of structural change* melahirkan stabilitas.¹⁵

Dalam menghadapi masalah Kashmir yang mengakar, terdapat fenomena-fenomena yang menunjukkan adanya pergeseran arah kebijakan India terhadap Pakistan. India di era Vajpayee dan Modi, memiliki karakteristik yang bukan hanya berubah, melainkan berlawanan arah dan semakin terlihat adanya perbedaan yang signifikan. Vajpayee membawa telah membawa citra India yang

¹⁴ James Rosenau, *The Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity* (Princeton: Princeton University Press, 1990): 19

¹⁵ J. Eli Margolis, “Understanding Political Stability and Instability,” *Civil War* 12, no. 3

tenang tapi pasti, sedangkan Modi merubahnya menjadi India yang lebih berani dan agresif. Maka dari itu, dalam penulisan akademik ini, peneliti akan membatasi fokus kasus penelitian yang akan dibahas. Kasus akan terfokus pada *behavior* India di masa Atal Bihari Vajpayee, yakni tahun 1998 sampai dengan 2004, dan masa pemerintahan Narendra Modi di tahun 2014 sampai dengan 2017.

Perilaku yang diperlihatkan India di rezim yang berbeda, tentunya akan berbeda juga. Atal Bihari Vajpayee, merupakan seorang mantan perdana menteri India yang dikenal sebagai pemimpin yang lembut dan kerakyatan. Hal tersebut tercermin pada gaya pemerintahannya yang membuat India terlihat lebih *soft* dalam menghadapi tekanan dari Pakistan terkait dengan masalah Kashmir, juga terorisme. Vajpayee kerap kali menginisiasi digelarnya dialog-dialog guna meresolusi permasalahan yang telah mengakar ini. Bagi India, di masa itu merupakan masa emas untuk membuka lembaran baru dalam menjalin hubungannya dengan Pakistan. Walaupun banyak kegagalan, terdapat berbagai resolusi telah dikemukakan dan diusahakan oleh India agar relasi tersebut membaik. Tetapi, kelembutan ini tidak menggeser kepentingan nomor 1 India, yakni keamanan dan pertahanan India yang utuh. Jikalau terdapat serangan, maupun gesekan dari sisi Pakistan, India menghadapinya dengan tegas. Tetapi, India masih menginginkan perkembangan relasinya dengan Pakistan lebih baik lagi. Visi dari India di tahun-tahun ini adalah dengan mengulurkan tangan agar keamanan, dan kedamaian tercipta di kawasan tersebut.

Di era yang berbeda, yakni di tahun Narendra Modi mengambil alih kedudukan perdana menteri, terlihat ada perbedaan arah perilaku India yang

cukup signifikan. Pasalnya, India mulai meningkatkan tingkat baktutembak di sepanjang garis perbatasan LoC. India tidak lagi mengambil jalur *soft* dalam menghadapi Pakistan dalam ajang memperebutkan daerah kekuasaan di Kashmir. Dialog-dialog resolusi pun tidak sedikit yang ditolak oleh pihak India, dengan alasan India sudah tidak dapat menaruh lagi kepercayaannya kepada Pakistan. Berbagai ancaman berupa pernyataan, isolasi, sampai kepada pengecaman sering dilontarkan New Delhi karena Islamabad tak pernah berhenti mendukung pasokan bagi kelompok terorismenya yang juga menyerang India. Uluran tangan yang sebelumnya diberikan Vajpayee tampak berubah menjadi kepalan tangan yang siap untuk memukul telak lawan. Doktrin baru yang diusungpun menjadi awal era pergeseran visi India, menjadi India yang lebih terlihat kuat dan agresif.

1.3. Perumusan Masalah

Dengan adanya perbedaan perilaku dan kebijakan luar negeri India terkait sengketa Kashmir dan Pakistan di era rezim Atal Bihari Vajpayee dan Narendra Modi, maka peneliti sampai pada sebuah pertanyaan riset, yaitu:

“Bagaimana perbedaan perilaku India dalam menghadapi sengketa Kashmir dengan Pakistan di rezim Atal Bihari Vajpayee dan Narendra Modi? Dan bagaimana komparasi faktor yang menyebabkan perbedaan perilaku tersebut?”

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari menganalisis kasus ini adalah untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi faktor penyebab adanya perbedaan perilaku India di era Atal Bihari

Vajpayee dan era Narendra Modi. Dalam arti lain, penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari perumusan masalah yang sebelumnya telah disebutkan di bagian Perumusan Masalah.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Selain itu, peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat:

- Berguna dalam menambah serta memperkaya studi Hubungan Internasional
- Bermanfaat dalam kajian regional
- Bermanfaat dalam kajian pertahanan dan keamanan
- Bermanfaat dalam kajian *state behaviorism*.

1.5. Kajian Literatur

Dalam subbab ini, peneliti akan membahas mengenai beberapa literatur yang telah ditulis oleh peneliti-peneliti terdahulu dengan topik yang serupa, agar penulisan akademik ini juga memiliki andil dalam topik terkait. Terdapat 2 *groupings* dalam kajian literatur ini, yakni yang membahas mengenai kebijakan India dalam sengketa Kashmie di era Vajpayee, serta kebijakan India dalam sengketa Kashmir di era Modi. Dari kajian ini, akan dapat terlihat pembagian, serta komparasi yang signifikan dari India di 2 masa yang berbeda. Dengan menjabarkan tulisan literatur terdahulu, peneliti akan dapat menjelaskan di manakah posisi penulisan akademik ini berada.

Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Layaslalu M., telah dijabarkan beberapa kebijakan pemerintah India semasa Vajpayee menjabat sebagai perdana

menteri. Layaslalu memberikan opini bahwa masa Vajpayee merupakan masa emas di mana setelah 70 tahun, India akhirnya menemukan titik terang dalam menjalin hubungan positif dengan Pakistan. Dengan adanya *non-military Confidence Building Measures*, menjadikan alasan mengapa Vajpayee sangat bertekad untuk mewujudkan ambisinya untuk menciptakan kedamaian di antara India, Pakistan, dan Kashmir. Tetapi bagaimanapun juga Vajpayee tidak segan-segan dalam menghadapi krisis infiltrasi teroris Pakistan di area Kargil.¹⁶ Dari jurnal ini, penulis berpendapat bahwa India di masa pemerintahan Vajpayee memang memiliki tekad yang bulat untuk menghidupi kembali relasi yang telah rusak dengan Pakistan. Tekad tersebut dibuktikan dengan CBMs yang dicetuskan oleh Vajpayee sendiri.

Sebuah tulisan karya Ganguly R. mengulas mengenai topik yang sama, yakni India, Pakistan, dan sengketa Kashmir. Dalam tulisannya, Ganguly berpendapat bahwa *'bus diplomacy'* yang diinisiasi oleh Vajpayee merupakan sebuah aksi yang sangat berani dan menjadi simbol yang unik dan positif dari awal persahabatan India dan Pakistan. Karena kehangatan Vajpayee, beliau pun banyak dipuji oleh masyarakat India, dan juga Pakistan. Walaupun Deklarasi Lahore ditutup dengan infiltrasi dan penyerangan di Kargil, tidak menutup kemungkinan bagi India untuk terus menjalin relasi yang positif dengan Pakistan. Dari beberapa opini Ganguly, dapat peneliti simpulkan bahwa India di masa

¹⁶ Layaslalu M., "The First Vajpayee Government: Golden Years of Non-Military Confidence Building Measures between India and Pakistan," *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* 22, no. 4 (2017)

Vajpayee terkesan tidak tegas dalam melawan kekerasan terhadap HAM yang dilanggar oleh pemberontak Kashmir, dan para kelompok teroris. Selain itu, tindakan terkait dengan *counter-terrorist*, India seharusnya dapat lebih berani dalam menindak lanjutinya.¹⁷ Menghadapi kasus terorisme, Vajpayee terkenal dengan pasif-defensifnya, tidak banyak ancaman dari pihak India untuk meredam aksi terorisme yang menimpa negaranya.

Selain masa Vajpayee, para peneliti terdahulu juga menuliskan penelitiannya terkait kebijakan dan perilaku India di masa Narendra Modi. Seperti Kanti Bajpai, yang menuliskan sudut pandanginya mengenai *assertive bilateral* dan *active coalition diplomacy* India di era Modi terhadap Pakistan dan China. Dalam jurnalnya, ia mengulas mengenai kebijakan Modi yang memiliki perdebatan apakah berubah haluan, atautkah tetap konsisten dengan kebijakan perdana menteri sebelumnya. Tetapi ia beropini bahwa memang Modi memiliki visi yang berbeda, dan memutar balik arah perilaku India yang sebelumnya *soft*, menjadi lebih agresif. Dalam jurnal ini juga dikatakan bahwa kebijakan Pakistan di era Modi memiliki dua komponen, yakni diplomasi bilateral dan diplomasi koalisi. Dalam hal ini, *game theorist* menyebutnya sebagai '*cooperation*' and '*defection*'.¹⁸ Menurut penulis, dari kedua *game theory* ini, Modi lebih condong ke arah koalisi, dibandingkan kooperasi. Berbagai lontaran ancaman banyak

¹⁷ Rajat Ganguly., "India, Pakistan and the Kashmir insurgency: causes, dynamics, and prospects for resolution" *Asian Studies Review* 25, no. 3 (2007)

¹⁸ Kanti Bajpai, "Narendra Modi's Pakistan and China policy: assertive bilateral diplomacy, active coalition diplomacy," *International Affairs* 93, no. 1 (2017)

dikemukakan secara gamblang oleh pihak India. Terlebih lagi, di pemerintahan Modi, India kerap kali menolak resolusi dialog yang diinisiasi oleh Pakistan.

Selain itu, George Perkovich, bersama Toby Dalton menumpahkan ide nya mengenai kebijakan yang diambil India semasa pemerintahan Modi ke dalam sebuah jurnal. Dalam jurnalnya, mereka menyebutkan bahwa perdana menteri sebelumnya cenderung menginginkan agar dialog resolusi digelar guna mencapai perdamaian. Tetapi hal tersebut berbeda dengan Modi, India di kala Modi memiliki reputasi yang mengarah kepada respons militer dibandingkan respons dialog. Dalam hal ini, disebutkan India mengikuti jejak Amerika Serikat dan Israel dalam menghadapi ancaman lawan. Walaupun India tak memiliki kekuatan ofensif sebesar kedua negara tersebut, tetapi Modi berpikir bahwa hanya cara ini yang dapat dilakukan untuk meredam musuh. Berbicara mengenai *airstrike* yang kerap kali dipakai India di medan tempur, hal ini juga memperlihatkan adanya eskalasi keagresifan India dalam konfliknya melawan Pakistan.¹⁹ Menjadikan Israel dan Amerika Serikat sebagai acuan untuk menerapkan strategi militer merupakan hal yang baik, tetapi bukan berarti India akan dapat menjadi sekuat kedua negara tersebut. Aksi ofensif yang dilancarkan India jika tidak diperhitungkan dengan cermat dapat menjadi bumerang bagi India sendiri. Karena jika dikarenakan oleh hal kecil saja, dan dibalas oleh respons militer, hal ini dapat mengakibatkan kerugian besar.

¹⁹ George Perkovich dan Toby Dalton, "Modi's Strategic Choice: How to Respond to Terrorism from Pakistan," *The Washington Quarterly* 38, no. 1 (2015)

Sebuah jurnal karya Sumit Ganguly yang membahas mengenai kebijakan Modi terhadap *foreign affairs*, memiliki sudut pandang. Kebijakan yang diulas meliputi relasi dengan Bangladesh, Nepal, Jepang, Iran, Amerika Serikat, dan termasuk juga Pakistan yang cukup menjadi *highlight* dalam jurnal ini. Tertulis bahwa India memiliki kebijakan ke arah yang positif dengan Bangladesh dan Nepal, tetapi berbeda dengan Pakistan. Modi merubah haluan layarnya menjauh dari Pakistan dan menyebabkan adanya *gap* dalam relasi tersebut. Pergeseran ini terlihat jelas di awal-awal diangkatnya Modi sebagai perdana menteri. India juga kerap kali memilih untuk membatalkan perundingan dengan alasan bahwa mereka tidak akan mentolerir campur tangan dalam urusan internal India. New Delhi sempat bersedia berunding, namun hal tersebut tidak diteruskan karena adanya bakutembak yang terjadi di perbatasan Jammu dan Kashmir., yang membuat kedua negara tersebut saling tuding-menuding satu sama lain.²⁰ Jurnal ini memfokuskan relasi India dengan Pakistan dengan dikaitkan kepada bagaimana proses dialog antara kedua pihak tersebut berjalan. Kegagalan dari perundingan ini dikarenakan banyaknya kecurigaan dari masing-masing kubu.

Setelah memaparkan beberapa kajian literatur, peneliti sampai kepada kesimpulan untuk memposisikan penulisan akademik ini, yaitu untuk berada di tengah-tengah dari kedua *groupings* yang telah disebutkan. Karena dari antara kedua *groupings* tersebut, penulisan akademik ini tidak hanya akan memfokuskan pembahasan penelitian mengenai 1 era pemerintahan saja, tetapi 2 era

²⁰ Sumit Ganguly, "Has Modi Truly Changed India's Foreign Policy?," *The Washington Quarterly* 40, no. 2 (2017)

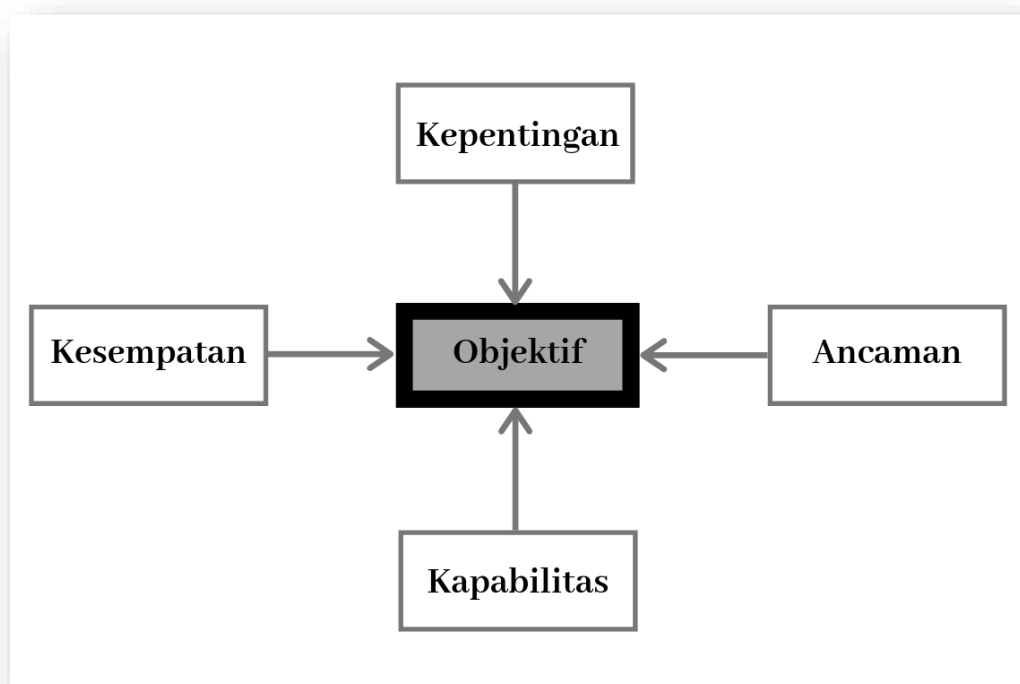
pemerintahan. Dengan adanya 2 perdana menteri yang akan dibahas, maka akan terlihat adanya perbedaan dari pemerintahan yang baru, dengan pemerintahan sebelumnya. Dengan begitu, penelitian ini dapat ikut mengambil andil dalam kajian literatur selanjutnya.

1.6. Kerangka Pemikiran

Dalam tulisan akademik ini, peneliti akan menggunakan sebuah konsep yang selanjutnya akan digunakan dalam bagian analisis atau bagian pembahasan. Konsep yang akan dibahas dalam subbab ini adalah konsep yang diambil dari teori realisme, yakni konsep *Interests, Objectives, and Capabilities of States*. Lihat gambar 1.6.1.

Gambar 1.6.1.

Understanding State Behavior



Objektif didefinisikan sebagai kepentingan yang lebih bersifat rinci sebagai bahan acuan atau *guideline*, maupun tujuan yang ingin dicapai. *Objectives* ini dipengaruhi oleh 4 hal, yakni *interests* (kepentingan), *opportunities* (kesempatan), *threats* (ancaman), dan *capabilities* (kapabilitas). Dari objektif sampai dengan kapabilitas, semuanya memiliki hubungan yang saling berkaitan. Seperti kesempatan, yang perlu ditangani atau dipakai dengan sebaik-baiknya, karena hal ini akan dapat membantu negara untuk mencapai sebuah objektif yang spesifik. Begitu juga dengan ancaman yang diartikan sebagai “adanya aktor penghalang”, ancaman ini harus dihadapi dan segera diselesaikan guna mencapai objektif yang ingin diraih. Sama halnya dengan kapabilitas sebuah negara yang akan diaplikasikan ke dalam *military power* guna mencapai objektif yang telah didesain oleh negara. Hal-hal ini akan dijadikan sebagai sebuah masukan bagi pemerintah negara untuk mengeluarkan sebuah kebijakan luar negeri ataupun mengubah perilakunya terkait objektif-objektif tertentu. Dalam bagian ini, penulis akan mengurai tiap-tiap faktor dari perilaku sebuah negara guna mencapai *objective* nya.²¹

Yang pertama adalah *national interests*, atau kepentingan nasional, yang merupakan konsep dasar dari studi Hubungan Internasional yang dijelaskan oleh Morgenthau, “*Thus all nations do what they cannot help but do: protect their physical, political and cultural identity against encroachments by other*

²¹ Paul R. Viotti, *International Relations and World Politics: Security, Economy, Identity*, 3rd ed., (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2007): 88

nations.”²² Dalam arti lain, *national interests* dapat didefinisikan sebagai sebuah *survival*. Hal ini dikarenakan oleh adanya gesekan-gesekan dari negara yang saling berhubungan. Kepentingan umum biasanya membahas mengenai tujuan apa saja yang sedang digencar oleh suatu negara. Dalam menjelaskan tujuan tersebut, kepentingan biasanya hanya sebatas bahasan umum, dan tidak merinci. Dan kebanyakan hal ini dapat terlihat dari pernyataan-pernyataan serta argumen yang diberikan pemerintah yang berkuasa di suatu negara. Menurut Viotti, *national interests* dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yakni: *national survival and sovereign status* (termasuk juga *right claimed* terhadap *jurisdiction, power* dan teritori), *economic vitality and prosperity* (yang bukan hanya dibutuhkan untuk kepentingan bagi masyarakat, tetapi juga dapat dipakai untuk sumber bagi power negara), dan *preservation of the society's core value* (berbicara mengenai identitas diri sebuah negara, “*Who am I and what are we stand for?*”).²³

Berbeda dengan *interests* yang menjelaskan tujuan sebuah negara terlalu umum atau general, objektif merupakan “anakan” dari *interests* yang sifatnya lebih spesifik terkait dengan visi dari suatu negara. Maka dari itu, objektif biasanya lebih ditekankan, terutama jika dikaitkan dengan pengaplikasian dan perumusan dalam *policy making*. Dan karena *objectives* ini merupakan “anakan” dari kepentingan, maka *objectives* yang ingin dicapai oleh negara, pastinya akan senada dengan kepentingan negara tersebut juga. Jika terkait dengan

²² Hans J. Morgenthau, "Another 'Great Debate': The National Interest of the United States, *in* *The American Political Science Review*, XLVI (December, 1952), 972. Hereafter cited as APSR XL VI.

²³ Paul R. Viotti, *International Relations and World Politics: Security, Economy, Identity*, 3rd ed., 89

mengamankan teritori atau wilayah negaranya, negara yang dikelilingi oleh daratan dan bersebelahan langsung dengan negara tetangga, akan memperkuat lini barisan dan pertahanan di perbatasan untuk mencegah adanya invasi, maka objektif dari negara tersebut adalah untuk mencegah invasi negara tetangga. Sedangkan, hal tersebut berbeda dengan negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan, objektif yang dituju oleh negara tersebut cenderung mengarah kepada proteksi terkait dengan garis batas pantai.

Selanjutnya adalah ancaman, dan kesempatan, yang merupakan sebuah kejutan bagi sebuah negara, karena kedua hal tersebut merupakan hal yang di luar kendali mereka. Menurut James Davis, dalam bukunya yang berjudul *Threats and Promises*, *threat* atau ancaman didefinisikan sebagai sebuah situasi di mana terdapat satu entitas yang memiliki kapabilitas yang dapat menimbulkan kerugian dan konsekuensi buruk pada entitas lainnya.²⁴ Dengan timbulnya pengaruh buruk dari ancaman negara lain, maka hal ini dapat memengaruhi objektif sebuah negara. Dalam *Threat Perception Theory* (TPT), yang dicetuskan oleh Stephen M. Walt, ancaman yang datang dari negara lain dapat berupa *aggregate capabilities*, serta *perception of intentions*.²⁵ *Aggregate capabilities* berbicara mengenai kekuatan agregat sebuah negara lawan yang meliputi sumber daya alam, seperti penduduk, kemampuan industri, dan militer. Kapabilitas agregat ini juga dapat dilihat dari

²⁴ Davis, James W. 2000. *Threats and promises: The pursuit of international influence*. Baltimore, MD:

Johns Hopkins University Press.

²⁵ Walt, S.M. (1985) *Alliance Formation and the Balance of World Power*. *International Security* 9(4): 3-43

Gross Domestic Product, atau GDP dari negara lawan tersebut, karena biasanya besar atau kecilnya GDP pasti mempengaruhi *military expenditures* sebuah negara.²⁶

Sedangkan *perception of intentions* atau *offensive intentions* berbicara mengenai sikap *offensive* yang ditunjukkan sebuah negara tergantung dengan strategi negara tersebut, bukan tergantung dengan kekuatan atau kapabilitas *offensive* yang dapat ia kerahkan. Negara yang berseteru dengan negara lain yang bersikap *offensive* perlu lebih berhati-hati dalam menyiasati strategi dalam penyerangan maupun dalam menyeimbangkan kekuatan, karena negara yang tampak *aggressive* cenderung dianggap lebih mengancam.²⁷ Sikap agresif ini juga dapat dipicu dari bantuan dari negara lain, seperti sokongan militer, asistensi, maupun perjanjian yang dapat menaikkan percaya diri lawan. Maka dari itu, dengan adanya ancaman, negara harus tetap berjaga-jaga dan tetap memerhatikan apa yang terjadi di dunia terkait negara tersebut. Begitu juga *opportunity*, yang juga senada dengan ancaman, bahwa negara harus selalu memerhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Karena dalam konsep kesempatan yang dijelaskan oleh Viotti, perbedaan yang muncul secara tiba-tiba, dan di luar kendali yang dapat menguntungkan suatu negara untuk mengubah arah objektifnya.

Rumput tetangga tidak selalu lebih hijau, tetapi rumput rumah kita juga tak selalu indah. Begitu juga dengan dunia internasional, negara tidak hanya harus

²⁶ Jasen Castillo, Julia Lowell, Ashley J. Tellis, Jorge Munoz dan Benjamin Zycher, *Military Expenditures And Economic Growth*, Santa Monica: Arroyo Center, 2001: 99

²⁷ Walt S. M., *Loc. Cit*

selalu memerhatikan kapabilitas dan kekuatan negara lain yang menjadi ancaman, tetapi juga harus memerhatikan bagaimana perkembangan *power* dan *capabilities* yang dimiliki oleh negara tersebut. Menurut Viotti, power diartikan sebagai “*the actual or potential influence or coercion a state or other actor can assert relative to other states and non-state actors based on the capabilities it possesses: political, geographic, economic and financial, technological, military, social, cultural, and other.*”²⁸ Dengan begitu, kekuatan dan kapabilitas merupakan dua hal yang berbanding lurus, dan memiliki definisi yang kurang lebih sama. Dalam bukunya “*International Relations World Politics: Security Economy, Identity*”, Viotti menegaskan mengenai kategori-kategori kapabilitas suatu negara, yang dibagi ke dalam lima bagian, yakni *political capabilities, geography, economic factors, military capabilities*, dan *social and cultural cohesion*. Dalam kategori kapabilitas yang akan diaplikasikan di dalam bab pembahasan, peneliti hanya akan memfokuskan dua kategori saja, yaitu *economic factors*, dan *military capabilities*.

Sama halnya seperti *threat* dari sebuah negara yang telah dibahas dalam paragraf sebelumnya, faktor ekonomi, kapabilitas militer merupakan salah satu ujung tombak dari bagaimana sebuah negara harus bersikap dan membuat keputusan dalam *foreign policy* nya. Ekonomi sangatlah penting bagi bagaimana negara tersebut berkembang, karena semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang dialami, semakin besar juga kapabilitas yang dimiliki negara tersebut. Faktor ekonomi ini dapat dilihat dari bagaimana perkembangan atau pertumbuhan GDP

²⁸ Viotti, 99

sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi pasti tidak lekang dengan pengeluaran negara, yang biasa disebut dengan *state expenditure* atau belanja negara. Kategori kedua, yakni *military capabilities*, memiliki hubungan yang cukup erat dengan faktor ekonomi yang telah dibahas dalam paragraf sebelumnya. Tingkat tinggi atau rendahnya faktor ekonomi sebuah negara akan berpengaruh (berbanding lurus) pada tingkat kapabilitas militer yang dimilikinya. Jika pendapatan ekonominya tinggi, maka negara pun memiliki kemampuan untuk memberikan anggaran yang juga tinggi di bidang militernya, baik pengeluaran untuk personel militer, persenjataan, mobil dan pesawat tempur, maupun *research and development*. Begitu juga dengan kepemilikan persenjataan nuklir, dapat menjadi salah satu faktor dari kapabilitas militer suatu negara.

1.7. Metodologi Penelitian

Dalam menganalisa sebuah penulisan akademik, terdapat 2 metode yang dapat digunakan, yakni metode kuantitatif, dan metode kualitatif. Berbeda dengan metode kuantitatif yang meneliti sebuah penelitian menggunakan perhitungan statistik, metode kualitatif menyajikan penelitian dengan sajian berupa literatur deskriptif, maupun naratif. Dalam menganalisis faktor perbedaan perilaku serta perilaku India, ini membutuhkan ulasan dan pembacaan yang luas dari data-data yang telah ditemukan. Maka dari itu, metode kualitatif merupakan metode yang tepat untuk digunakan dalam penulisan akademik ini. Kualitatif memiliki sifat yang menyeluruh, kompleks, serta interpretif, yang berarti adanya pembentukan

pemahaman dari suatu kondisi yang subjektif.²⁹ Dalam melakukan penelitian kualitatif, fenomena yang dibahas akan dikerucutkan sehingga muncul sebuah *scope* dari penelitian tersebut yang nantinya melahirkan sebuah rumusan penelitian. Selanjutnya, sebuah teori yang pas akan dipilih untuk dapat menjadi acuan dalam menganalisis data.

Metode kualitatif memiliki 5 desain penelitian, yakni *experimental design*, *cross-sectional design*, *longitudinal design(s)*, serta *case study design* atau desain studi kasus. dalam penulisan akademik ini, penulis kan menggunakan model penelitian studi kasus. Studi kasus berguna untuk mengerucutkan sebuah penelitian dari sudut pandang lokasi, maupun waktu dari sebuah fenomena. Model penelitian studi kasus akan dapat menghasilkan sebuah hasil temuan penelitian yang intensif dan terperinci.³⁰ Dari sebuah studi kasus, akan terlihat adanya pembatasan variabel, serta periode yang ditentukan. Dalam hal ini, penulisan akademik ini akan mengeksplorasi suatu fenomena yang terfokus pada studi kasus kebijakan luar negeri India terhadap Pakistan terkait sengketa Kashmir di masa pemerintahan Vajpayee (1999-2004) dan era kepemimpinan Modi (2014-2017).

Pengumpulan data sendiri ini merupakan kunci dari setiap proyek penelitian, karena sebuah penelitian tidak akan dapat berjalan tanpa adanya data-data relevan yang terkumpul. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penulisan akademik ini adalah pengumpulan data sekunder, yang terkait dengan buku, jurnal, makalah penelitian, dokumen resmi, serta situs daring yang

²⁹ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 2nd ed. (California: Sage Publications Inc., 2007).

³⁰ Alan Bryman, *Social Research Methods*, 4th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2012): 66-68

terpercaya.³¹ Peneliti menganggap bahwa hal tersebut merupakan cara yang paling mudah untuk dilakukan guna mempercepat dan memudahkan peneliti untuk membuat kesimpulan dari perumusan masalah. Data-data tersebut akan melewati pemeriksaan kredibilitas untuk memastikan setiap sumber yang didapat, merupakan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang diperiksa oleh peneliti yakni siapa atau institusi apakah yang memproduksi dokumen, serta bagaimana keabsahan materi dalam dokumen tersebut. Lalu data yang telah dikumpulkan dan diperiksa, nantinya akan ditriagulasi dan membuat sebuah kesimpulan yang akan menjawab perumusan masalah penulisan akademik ini.

1.8. Sistematika Penulisan

Peneliti membagi penulisan akademik ini ke dalam bagan-bagan berbentuk bab dan subbab. Bab yang dipaparkan berisi 4 bab, yang akan dijabarkan secara tahap penulisannya sebagai berikut: bab I membahas mengenai latar belakang masalah, serta identifikasi dan pembatasan masalah. Dilanjutkan dengan pertanyaan riset, tujuan dan kegunaan penelitian, serta kajian literatur. Selain itu, bab ini juga mengulas mengenai kerangka konseptual dan metode serta teknik yang dipergunakan untuk menganalisis studi kasus terkait. Lalu, bab II dimulai dengan penjelasan kebijakan India di masa Atal Bihari Vajpayee, dilanjutkan dengan era Narendra Modi. Dan bab ini diakhiri dengan penjabaran mengenai adanya perbedaan perilaku India dari kedua perdana menteri ini.

Selanjutnya bab III mengulas lebih dalam mengenai perilaku India di kedua era, yang dibagi ke dalam 5 subbab, yakni subbab yang membahas

³¹ Bryman, *Social Research Methods*, 4th ed., 11-12

kepentingan nasional, ancaman yang dihadapi, kesempatan, serta kapabilitas India di masing-masing pemerintahan Vajpayee dan Modi. Subbab terakhir memaparkan kesimpulan dari faktor komparasi dari perilaku tersebut yang disajikan dalam bentuk tabel. Dan penelitian akademik ini ditutup dengan bab terakhir, yakni bab 4 mengulas kembali kesimpulan dan temuan yang telah dianalisis, serta dibubuhi dengan beberapa keterbatasan dari penelitian ini, dan saran untuk penelitian selanjutnya terkait dengan topik yang serupa.